

## PELUANG DAN HAMBATAN UPAYA REUNIFIKASI KOREA PADA ERA KIM JONG UN

**Rafika Arsyad**  
Universitas Peradaban  
rafika.arsyad@gmail.com

### ABSTRACT

*For some decades Korean reunification issue become the most unclear issue in the relations between South and North Korea. The reunification process always takes along time discussions and conditions when in the end all the efforts are useless. North Korea wants an independent reunification, yet it seems impossible. However, the third supreme leader, Kim Jong Un, for the first time in the history shows his positive intention towards this issue to South Korea. This paper would like to enrich the literature regarding Korean reunification issue, focused on the Kim Jong Un era which predicted to be the last supreme leader of North Korea. This paper conducted by qualitative approach. The data collection technique is based on the literature study that consisting of books, journals and reliable articles in the official websites of the past and recent literature regarding Korean reunification. The result of this study shows that North Korean supreme leader, Kim Jong Un's reunification proposal which carries a pledge of denuclearization, emerge two predictions that Kim Jong Un's reunification strategies is a serious matter or it is just another strategy of coax and cajole the other players. In addition, another problem that will be arise along this step of reunification is the weakening of the North Korean bargaining position in the international level, South Korean people's support to reunification is not as enthusiastic in the past few years. Only the older generation whom still expecting and waiting the good and clear progress of Korean reunification while South Korean youth are reluctant to be reunited. In the other hand, the huge gap in the cultural and economic conditions will be a new problem after the realization Korean reunification. To accomplish this, of course it takes a long time to pursue such a distant difference and neither easy nor cheap, it will takes another long journey for both Korea.*

**Keywords:** Korean reunification, Kim Jong Un, North Korea

### ABSTRAK

*Reunifikasi Korea merupakan isu yang tidak kunjung memperlihatkan hasil yang signifikan. Kendati demikian, Kim Jong Un sebagai pemimpin generasi ketiga Korea Utara mulai memperlihatkan itikad baik untuk meneruskan upaya reunifikasi melalui jalur perdamaian. Paper ini ditulis untuk turut meramalkan isu literatur terkait reunifikasi Korea terkhusus pada masa kepemimpinan Kim Jong Un yang oleh para pengamat Korea Utara sebagai pemimpin yang akan membawa Korea Utara pada masa keruntuhan rezim. Tulisan menggunakan metode study pustaka dengan sumber data yang didapat melalui berbagai buku, berita, artikel, jurnal, serta data lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Hasil yang didapatkan adalah tawaran reunifikasi Kim Jong Un yang membawa janji denuklirisasi, adalah satu hal yang menimbulkan dua perkiraan, yakni tawaran dan upaya reunifikasi yang dilakukan Kim Jong Un merupakan satu hal yang serius atau hanya strategi lain dari untuk mengelabui dan memperdaya. Selain itu, masalah lain yang akan ditemui yakni melemahnya posisi tawar Korea Utara, reaksi masyarakat Korea Selatan yang tidak lagi seantusias pada masa beberapa tahun lalu, disaat kelompok muda Korea Selatan enggan untuk melakukan reunifikasi. Di samping itu pula, kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang sangat jauh berbeda akan menjadi masalah serius lain setelah terwujudnya reunifikasi Korea. Untuk menyelesaikan hal tersebut, tentu saja hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama guna mengejar perbedaan yang jauh tersebut dan juga tidak mudah maupun murah.*

**Kata Kunci:** Reunifikasi Korea, Kim Jong Un, Korea Utara

## I. PENDAHULUAN

Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan penanda dari kelalahan Uni Soviet, memiliki arti penting bagi beberapa negara yang menjadi korban dalam perang dingin. Negara-negara yang terpisah akibat dua kekuatan besar kala itu, pada akhirnya dapat kembali pada bentuk aslinya, menjadi satu negara yang utuh. Kendati demikian hal tersebut tidak berlaku bagi dua negara yang terletak Semenanjung Korea yang hingga sampai saat ini masih terpisah dan cenderung terlibat dalam kondisi tidak harmonis. Pemisahan kawasan semenanjung Korea yang pada awalnya merupakan upaya pemisahan sementara oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, rupanya memberikan dampak yang sangat signifikan bagi dua kawasan tersebut. Kependudukan dua kekuatan besar disemenanjung Korea telah memberikan pengaruh yang kuat pada masing-masing wilayah Korea hingga akhirnya mengokohkan keduanya menjadi dua negara baru yang merdeka.

Pendeklarasian dua Korea menjadi negara merdeka, juga berarti pemisahan masyarakat Korea secara resmi dan permanen. Hal ini tentu saja menjadi isu yang dramatis dikalangan masyarakat kala itu, dimana mereka harus berpisah secara paksa dengan sanak saudara yang hidup dibagian Korea lainnya. Hal ini tidak akan begitu dramatis jika saya hubungan antar Korea adalah hubungan yang harmonis. Namun, dengan adanya berbagai ketebatasan dalam hubungan antar dua negara ini, maka masyarakat Korea tidak dapat dengan bebas untuk menjalin komunikasi dengan keluarga yang tinggal di sisi lain semenanjung Korea. Pada dasarnya upaya reunifikasi telah dimulai sejak awal dua Korea merdeka, dengan melakukan berbagai pendekatan formal, seperti mengadakan berbagai dialog, pemberian bantuan ekonomi, hingga melakukan penekanan militer dan melibatkan organisasi internasional seperti PBB. Namun belum juga menemui titik terang. Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Il dianggap sebagai ancaman bagi dunia internasional, setidaknya itu anggapan dari Amerika Serikat. Upaya-upaya jalur damai juga telah dilakukan untuk meredakan berbagai ketegangan. Kondisi ini terjadi karena pada saat itu reunifikasi yang dimaksudkan oleh masing-masing Korea adalah penyatuan kembali menjadi satu negara utuh dalam satu administrasi pemerintahan. Korea Utara menginginkan penyatuan Semenanjung Korea dibawah slogan "*Our-style Socialism*" sedangkan Korea Selatan yang dipimpin oleh Syngman Rhee menginginkan Korea Utara untuk menjadi bagian dari Korea Selatan begitupula dengan kekuatan militernya. Upaya tersebut tentu saja menggagalkan harapan reunifikasi. Hingga saat mundurnya Presiden Syngman Rhee pada tahun 1960 dan dengan munculnya PM Chang Myong sebagai pengganti Syngman Rhee, kebijakan reunifikasi dari pihak Korea Selatan mulai mengalami

perubahan, Ia secara eksplisit menyatakan bahwa Korea Selatan tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai reunifikasi dan akan mengembangkan sikap fleksibel terhadap negara-negara non-blok. Pernyataan sikap tersebut mendorong Kim Il Sung untuk memberi usulan baru berupa pembentukan Konfederasi Utara-Selatan. sebelum pelaksanaan pemilu. Konfederasi ini terdiri dari perwakilan dua Korea yang bertugas untuk mengatur pembangunan ekonomi dan kebudayaan dua Korea. Pembentukan Konfederasi merupakan tahapan transisional menuju reunifikasi sehingga oleh Korea Utara ini dianggap perlu. Selain itu juga untuk menghalau adanya campur tangan pihak asing dalam proses pemilu tersebut.

Hingga pada tahun 2000, kesepakatan reunifikasi melalui jalur damai pun disepakati oleh pemimpin masing-masing Korea, Presiden Kim Dae Jong dan Kim Jong Il pada KTT yang dilakukan di Pyongyang. Dan Sejak saat itulah, konsep baru reunifikasi Korea mulai dikuatkan, yakni hidup bersama dengan damai dan sejahtera dengan mengakui masing-masing pemerintahan, bukan reunifikasi dalam bentuk struktur tunggal antara Utara – Selatan (Yoon 2004). Presiden Kim Dae Jung, juga menentukan kebijakan *Sunshine* diplomasi yang pada akhirnya dapat meredakan berbagai ketegangan antar dua Korea. Dari implementasi kesepakatan damai dari kedua belah pihak Korea, lahirlah beberapa kerjasama antar Korea seperti kerjasama kemanusiaan, militer dan ekonomi. Namun, upaya-upaya damai menuju reunifikasi masih saja mengalami kegagalan dan menemui berbagai kebuntuan politik. Dalam kondisi yang tidak pasti tersebut, Korea Selatan dibawah Presiden Roh Moo Hyun kembali melanjutkan memilih damai kepada Korea Utara dengan kebijakan yang disebut dengan kebijakan *Peace and Prosperity* sebagai kelanjutan upaya *Sunshine* diplomasi presiden Kim Dae Jung. Dari kebijakan ini kerjasama ekonomi dua Korea dan pertukaran masyarakat (langkah awal reunifikasi) mengalami peningkatan tiga hingga sepuluh kali lebih tinggi (Jung 2012).

Fluktuasi hubungan antar dua Korea sudahlah menjadi rahasia umum. Hubungan harmonis yang diharapkan akan tetap berlangsung setelah kesepakatan yang berhasil dilakukan oleh Presiden Kim Dae Jung, ternyata tidak dapat dipertahankan seiring dengan perubahan kepemimpinan di Korea Selatan maupun kebijakan yang dilakukan oleh Korea Utara itu sendiri. Ketegangan dua Korea semakin memuncak pada saat Kim Jong Il menetapkan kebijakan “*army-centred*” yang diikuti dengan pengembangan senjata nuklir yang dimana pada saat itu Korea Selatan dibawah kepemimpinan Lee Myung Bak, juga membentuk “*peace keeping force*” sebagai strategi dalam mencapai perdamaian dengan Korea Utara. Tindakan kedua Korea dalam mencapai perdamaian tidaklah berjalan mulus.

Korea Utara dinilai menjadi sebuah ancaman bagi dunia internasional, setidaknya itulah yang disebutkan oleh Amerika Serikat kala itu. Tentu saja hal ini semakin mempertegang hubungan dengan Utara mengingat kedekatan Korea Selatan dengan Amerika Serikat, yang saat itu negara pemenang perang dunia ke II ini, dengan terang dan jelas telah memosisikan Korea Utara sebagai “musuh bersama” dengan menyatakan Korea Utara sebagai “*Axis of Evil*”. Benar adanya bahwa pada hubungan antar dua Korea terdapat sebuah alur atau proses tawar-menawar yang sangat panjang dalam pembahasan isu persyaratan reunifikasi. Tidak mudah untuk mencari *win win solution* akan upaya reunifikasi yang pada upayanya selalu mengalami stagnansi. Kendati demikian, Kim Jong Un, selaku pemimpin Korea Utara mulai menunjukkan adanya keterbukaan diri akan upaya reunifikasi. Dalam pidato tahun baru, Kim Jong Un menyatakan keinginannya untuk segera memperbaiki kondisi antar dua Korea dengan menurunkan berbagai ketegangan untuk melakukan reunifikasi (Fitriani 2018). Hubungan dua Korea semakin luber sejak olimpiade musim dingin yang membawa Korea dalam satu bendera, kehangatan hubungan kedua negara ini berlanjut pada hal yang mengejutkan, yakni adanya tawaran reunifikasi Korea.

## II. PEMBAHASAN

Korea Utara adalah negara yang unik, dengan berbagai keterbatasannya ia masih mampu menjadi satu “pikiran utama” bagi dunia internasional, termasuk negara-negara besar. Bahkan semenjak runtuhnya Uni Soviet dan negara-negara komunis lain, Korea Utara masih bisa bertahan hingga saat ini dan menjadi satu negara komunis dan merupakan bukti nyata adanya kekuatan internal negara yang dapat “hidup sendiri” tanpa mengikuti arus populer dunia. Dalam hal ini lebih tepat disebut bahwa Korea Utara bertindak atas *Juche*, secara kasar dapat diartikan sebagai “kemandirian”. Ini merupakan satu paham yang dibentuk oleh Kim Il Sung sebagai pendiri Korea Utara, dimana *Juche* merupakan perpaduan unik antara Marxisme dan konsep Konfusiunisme, imperialisme Jepang pada abad ke-20-an dan nasionalisme Korea. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Korea Utara harus menjadi Negara yang tetap terpisah dan berbeda dengan dunia luar serta bergantung pada kekuatan sendiri secara penuh dengan arahan dari pemimpin yang nyaris seperti dewa (Beauchamp 2018). Lankov menambahkan bahwa, Korea Utara adalah negara yang normal dan merupakan relik hidup. Korea Utara adalah negara yang rasional dan dapat diprediksi. Jika tidak maka negara-negara seperti Amerika dan negara

besar lainnya tidak akan pusing menghadapi berbagai gertakan Korea Utara (Lankov 2013).

Munculnya Kim Jong Un sebagai pemimpin baru Korea Utara bukanlah hal yang baru. Sebelumnya berbagai prediksi menyatakan bahwa ia akan menjadi penerus ketiga rezim Korea Utara pasca Kim Jong Il, seiring dengan kemunculannya dalam berbagai acara kenegaraan, termasuk dalam kunjungan Kim Jong Il ke Tiongkok pada tahun 2010. Kim Jong Un sendiri merupakan anak termuda dari pernikahan Kim Jong Il dengan istri ketiganya. Ia memiliki pendidikan dari Swiss dan posisi yang baik dalam pemerintahan yang sangat menjanjikan. Kendati demikian, usianya yang masih terbilang muda memancing spekulasi akan lemahnya pengalaman dalam memimpin sebuah negara. Banyak yang melihat sosok Kim Jong Un ini merupakan seorang yang diperkirakan akan menghancurkan rezim komunis yang hingga kini erat melekat pada negara nuklir tersebut. Disisi lain muncul pendapat yang menyatakan bahwa Korea Utara akan melakukan berbagai macam perubahan dan kebijakan luar negeri yang tidak dapat diprediksi dan mengejutkan dunia internasional. Sosok Kim Jong Un dianggap sangat misterius dan tidak dapat diprediksi dengan mudah, namun dalam beberapa hal terlihat dengan jelas bahwa ia berusaha menyamakan dirinya dengan Kim Il Sung sebagai pendiri Korea Utara (Lankov 2013), sehingga terdapat titik terang untuk melihat gambaran kebijakan yang kemungkinan akan ia lakukan.

Setelah resmi menjadi pengganti Kim Il Sung dan mendapatkan janji setia dari seluruh masyarakat Korea Utara, namun dengan kondisi yang masih terbilang muda dan tidak cukup pengalaman dalam memimpin negara, Kim Jong Un menyadari adanya keraguan yang muncul dari berbagai kalangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kim Jong Un pada awal karir pemerintahannya lebih milih untuk mengunci posisinya sebagai jenderal tertinggi angkatan bersenjata terlebih, dibandingkan menjadi pemimpin partai buruh atau ketua komisi pertahanan nasional. Kim Jong Un berpendapat, dengan menguasai kekuatan militer secara penuh, maka ia akan dapat akan mewarisi alat kontrol terpenting bagi Korea Utara dan juga kebijakan "*military first*" Kim Jong Il (S.H 2011). Keputusan Kim Jong Un untuk mengeksekusi paman dan saudara tirinya juga disebut-sebut sebagai langkahantisipasi untuk mengamankan posisinya sebagai Pemimpin Korea Selatan. Selain itu Kim Jong Un mengangkat sang adik Kim Yo Jong sebagai wakil direktur departemen propaganda dan agitasi partai buruh Korea Utara pada tahun 2014.

Bagi Korea Utara isu reunifikasi merupakan sebuah kepentingan nasional yang perlu dicapai. Hal ini sesuai dengan pasal 9 bab 1 konstitusi Korea Utara yang menyatakan bahwa

*"The DPRK shall strive to achieve the complete victory of socialism in the northern half of Korea by strengthening the people's power and vigorously performing the three revolutions -- the ideological, cultural and technical -- and reunify the country on the principle of independence, peaceful reunification and great national unity."*(Lee 2014)

Kutipan pasal tersebut ditekankan bahwa melakukan revolusi dan menyatukan kembali Korea adalah prinsip kemerdekaan, reunifikasi yang damai dan persatuan bangsa yang besar. Dengan demikian reunifikasi Korea dipandang sebagai salah satu isu yang perlu untuk segera diperjuangkan. Namun, upaya ini bukanlah hal yang mudah, terutama dengan adanya faktor pihak ketiga.

Pada hubungan Korea Utara dan Selatan isu reunifikasi menjadi cukup pelik dengan adanya kedekatan hubungan Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Pada dua periode sebelum Kim Jong Un, isu reunifikasi selalu tersendat masalah politik yang tidak kondusif tersebut. Sebagai pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, juga menyadari hal itu dengan sangat jelas. Dalam sebuah pidato kenegaraan Kim Jong Un menyatakan,

*"...Korea Selatan yang berpihak pada Amerika Serikat menjalankan kebijakan bermusuhan terhadap Korea Utara, melawan aspirasi semua rekan senegara untuk penyatuan kembali (reunifikasi) nasional".* Kemudian ia melanjutkan *"Situasi yang berlaku menuntut agar sekarang utara dan selatan memperbaiki hubungan antara mereka dan mengambil tindakan tegas untuk mencapai terobosan untuk reunifikasi independen."*...(Fitriani 2018)

Pernyataan tersebut merupakan fenomena baru dalam sejarah dua Korea karena untuk pertama kalinya pihak Korea Utara menawarkan reunifikasi dan langsung sambut dengan respon positif dari Korea Selatan. Menindak lanjuti pernyataan Kim Jong Un, Korea Selatan dengan terbuka menerima kunjungan perdana pemimpin Korea Utara tersebut dalam KTT yang diselenggarakan di Korea Selatan pada 27 April 2018 silam.

Untuk pertama kalinya juga dalam sejarah hubungan dua Korea, pemimpin tertinggi Korea Utara mengunjungi Korea Selatan untuk membahas berbagai isu terkait perdamaian kedua negara. Dalam kunjungan tersebut, Kim Jong Un juga menuliskan pesan bahwa sejarah baru akan dimulai, di titik awal sejarah dan era perdamaian (Antony 2018). Tindakan tersebut merupakan langkah awal Korea Utara untuk dapat menciptakan suasana yang nyaman dengan Korea Selatan. Berdasarkan pada Jung Jai Kwon dan Chad Rector,

reunifikasi Korea memiliki dilema, yakni hubungan Korea Utara dan Selatan yang belum berada pada posisi perdamaian murni atau dengan kata lain masih dalam keadaan gencatan senjata, maka setiap kesepakatan reunifikasi akan mempengaruhi nilai tawar masa depan bagi dua Korea. Dengan demikian akan sulit untuk dapat memulai suatu proses reunifikasi yang murni untuk mengintegrasikan dua sistem politik yang berbeda (Jung 2012). Dari pertemuan tingkat tinggi Korea juga telah melahirkan kesepakatan yang bagus bagi visi reunifikasi. Bagi Selatan meredanya ketegangan antar Korea dan telah disepakatinya perjanjian damai antar Korea dapat juga di lihat sebagai peluang untuk membujuk Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya dan menjembatani pertemuan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat, selaku negara yang memiliki pengaruh dalam upaya reunifikasi Korea.

Untuk melihat peluang reunifikasi pada rezim Kim Jong Un, pendekatan pengambilan keputusan muncul sebagai salah satu alternatif sederhana yang dapat digunakan. Pendekatan ini pertama kali dikenalkan oleh pemikir Yunani, Thucydides, melalui karyanya "*Peloponesian War*". Dipaparkan adanya gagasan tentang berbagai faktor yang mempengaruhi para pemimpin negara dalam memutuskan berbagai kebijakannya. Rosenau menambahkan proses tersebut memiliki pengaruh-pengaruh eksternal maupun internal yang berasal dari berbagai peristiwa yang menjadi faktor-faktor yang layak untuk dijadikan pertimbangan dalam proses pembuatan keputusan. Pada pendekatan ini juga, Graham T. Allison menawarkan beberapa alternatif model, yang salah satunya adalah model aktor rasional. Model ini melihat pilihan rasional sebagai tindakan yang disengaja oleh pemerintah didasarkan pada pemikiran yang logis, berdasarkan pada perhitungan untung-rugi dan juga kepentingan nasional suatu negara. Dengan kata lain, pendekatan klasik ini menekankan pada pendekatan yang melihat pada hubungan-hubungan dari berbagai tindakan yang paling masuk akal. Pendekatan memberikan banyak kontribusi dalam berbagai penjelasan terkait dengan tindakan-tindakan suatu negara dalam percaturan politik internasionalnya. Model klasik ini dinilai masih memiliki kekurangan, dimana cenderung mengabaikan fakta bahwa si pembuat keputusan yakni pemerintah, adalah manusia yang bisa membuat kesalahan. Pemerintah sebagai seorang individu telah dan akan menghadapi berbagai peristiwa baik eksternal maupun internal birokrat, kelompok kepentingan, opini publik dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan adanya pengaruh-pengaruh tertentu. Sehingga untuk mengatasi kekurangan atas asumsi tersebut, maka Allison kembali memberikan alternatif lain untuk menjelaskan berbagai kemungkinan yang dapat berpengaruh dalam proses

pengambilan keputusan, seperti model politik birokratik dan proses organisasi (Dahlan:1996).

Sebagaimana Rosenau katakan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal bagi sebuah negara maupun seorang pemimpin untuk melakukan suatu kebijakan, tidak terkecuali dalam kasus reunifikasi Korea yang ditawarkan oleh Kim Jong Un. Sebagai pemimpin yang masih “diragukan”, Kim Jong Un berniat untuk memperlihatkan kekuatan dan posisinya sebagai pemimpin tertinggi di Korea Utara. Hal ini dilakukan Dengan kata lain, ia ingin menorehkan sejarah baru yang belum pernah dicapai dalam rejim Korea Utara pada masa terdahulu. Sejak ia mengambil alih kepemimpinan, Kim Jong Un pada dasarnya telah berupaya melakukan beberapa perubahan kebijakan. Dalam bidang ekonomi dan militer, Korea Utara telah membentuk suatu “biro politik” yang akan menjalankan mengambil alih kendali atas perekonomian pasca insiden kelaparan pada tahun 1990-an silam. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa Kim Jong Un tidak ingin mengulangi “kegagalan” ayahnya dengan melimpahkan urusan ekonomi pada biro tersebut. Selain itu untuk dapat memperhalus rencana tersebut, Kim Jong Un juga telah membentuk “*economic reform group*” yang akan bertugas untuk mengawasi reformasi pertanian dan ekonomi.

Selain isu ekonomi dan militer, isu yang menjadi sasaran reformasi kedua Kim Jong Un. Dalam *Preparing For Korean Unification: Scenarios & Implications*, dijelaskan adanya tiga skenario reunifikasi, diantaranya adalah pertama reunifikasi melalui konflik atau kekerasan. Melakukan upaya reunifikasi dengan interaksi kekerasan fisik seperti halnya peperangan untuk dapat mengambil alih kendali atas negara. Kedua reunifikasi melalui keruntuhan (rezim) dan penyerapan. Yang dimaksud adalah ketidakmampuan dari rezim yang berkuasa untuk mempertahankan kontrol politik, ekonomi, sosial, dan militer secara efektif. Keadaan tersebut kemudian akan mengarah pada pembubaran rezim tersebut, dan dalam kasus yang ekstrim, adalah dengan berakhirnya eksistensi sebuah negara dan yang ketiga adalah penyatuan melalui evolusi dan integritas. Keadaan dimana dua Korea tidak lagi saling bermusuhan, tidak ada ancaman militer atau penyerangan dan perbedaan ideologi tidak lagi menjadi perdebatan. Dengan keadaan yang tenang tersebut maka pada akhirnya akan menjadikan dua Korea tersebut menjadi satu negara Korea secara perlahan (Pollack 1990).

Dari beberapa skenario tersebut, dua skenario terakhir merupakan yang paling banyak diprediksikan. Reunifikasi melalui jalur kekerasan hanya akan menambah kerugian bagi dua Korea, sebagaimana yang telah terjadi pada perang saudara tahun 1950-an.



Skenario kedua ini merupakan langkah yang masih abu-abu terjadi. Namun bagi beberapa peneliti runtuhnya rezim Korea Utara merupakan satu hal yang mustahil, setidaknya pada masa kepemimpinan Kil Jong Il dan memang hal tersebut terbukti benar. Hingga sepeninggal Kim Jong Il, Korea Utara masih bertahan menjadi satu negara yang beridentitas militer dan tertutup. Pada skenario ke tiga, digambarkan reunifikasi akan terjadi pada saat dua Korea sudah dalam situasi damai. Pada Maret 2018 lalu, pernyataan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, dalam pertemuannya dengan Presiden Korea Selatan di Pyongyang telah kian menumbuhkan harapan baru akan terwujudnya upaya reunifikasi. Dalam pertemuan tersebut Kim Jong Un, menyinggung isu reunifikasi untuk segera diselesaikan dan memperbaiki hubungan antar Korea.

Kebijakan reunifikasi yang ditawarkan Kim Jong Un bukan tanpa sebab yang tidak pasti. Sejak berdirinya Korea Utara dan semakin buramnya upaya reunifikasi, banyak dari masyarakat Korea Utara yang melarikan diri ke Selatan dan juga negara-negara lainnya. Negara ini hanya memiliki 25 juta jiwa, merupakan separuh dari jumlah populasi di Korea Selatan dan sejak tahun 2004 terhitung kurang lebih 225 pengungsi dari Korea Utara yang langsung diberikan suaka di Amerika Serikat sejak adanya Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia Korea Utara yang ditandatangani oleh Presiden George W. Bush. Selanjutnya terdapat 250 lebih warga Korea Utara yang masuk sebagai imigran setelah mendapatkan kewarganegaraan Korea Selatan dan kurang dari 1000 imigran illegal Korea Utara yang tinggal di Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, para pengungsi juga berusaha mencari kehidupan di negara-negara Eropa dengan jumlah total kurang lebih sebanyak 1.400 orang. Dari publikasi resmi yang diumumkan oleh pemerintah Korea Selatan, terdapat lebih dari 30.000 pengungsi yang melarikan diri dari Utara sejak tahun 1998. Banyaknya rakyat Korea yang melarikan diri pada tahun itu adalah sebagai dampak dari bencana kelaparan yang telah memakan korban lebih dari satu juta orang. Pemerintah Korea Selatan mencatat terdapat 302 laki-laki dan 116 perempuan dengan jumlah total 947 pengungsi (McKay 2017).

Banyaknya rakyat Korea Utara yang melarikan diri memperlihatkan bahwa kehidupan di Negara dengan sebutan "*Hermit Kingdom*" itu tidaklah menyenangkan yang diberitakan oleh pemerintah Korea Utara. Dikabarkan pada tahun 2016 Korea Utara mencetak angka 28.6 pada *Global Hunger Index*. Angka tersebut memperlihatkan situasi Korea Utara dalam kondisi yang sangat serius hingga dikatakan dalam keadaan darurat makanan. Program Pangan Dunia telah melaporkan bahwa 70% dari 25,1 juta penduduk

Korea Utara dalam keadaan "tidak aman pangan" dengan kondisi kekurangan gizi kronis (Cain 2017).

Dengan adanya isu reunifikasi yang hingga saat ini sudah cukup terlihat menjanjikan, dapat berdampak pada menurunnya jumlah pelarian Korea Utara dan kondisi ini sudah pasti akan berdampak positif bagi kepemimpinan Kim Jong Un. Disisi lain, untuk mencapai target reunifikasi, sebagai pemimpin yang bertujuan menciptakan sejarah baru bagi Korea Utara, Kim Jong Un sadar bahwa hal pertama yang perlu ia lakukan adalah mencapai reunifikasi. Selain membuat sejarah, Kim Jong Un yang sejak awal telah banyak diragukan, akan menjadi sosok yang dikenal sebagai tokoh revouisioner. Jauh dari pada itu, hal dasar yang harus dimiliki guna mencapai target-target tersebut dan untuk menjadi satu pemimpin Korea Utara yang dapat diperhitungkan, ia harus ia memiliki kemampuan untuk dapat bernegosiasi dengan Amerika Serikat (Meyer 2012). Hal ini menjadi penting mengingat sejak awal, hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat tidak pernah harmonis. Korea Utara dianggap sebagai gangguan terbesar bagi upaya diplomasi Amerika Serikat di Asia Pasifik (Goffard 2014) dan Amerika Serikat dianggap sebagai gangguan bagi Korea Utara dalam merealisasi reunifikasi Korea.

Amerika Serikat sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar bagi Korea Selatan dalam menentukan kebijakan reunifikasi, disamping kebijakan reunifikasi Korea Selatan yang akan menyesuaikan dengan kebijakan luar negeri Korea Utara. Pada masa kepemimpinan sebelumnya, dengan jelas dipaparkan bahwa baik Kim Il Sung maupun Kim Jong Il tidak ingin adanya campur tangan Amerika dalam urusan politik dan militer jika ingin adanya reasilasi reunifikasi yang kedua Korea harapkan.

Dalam buku *From Ostpolitik to Reunification West German-Soviet Political Relation : Since 1974* yang ditulis oleh Avril Pittman, disebutkan bahwa dalam sebuah reunifikasi aktor yang memiliki peranan penting dalam upaya reunifikasi adalah pemerintah. Dengan demikian, jika reunifikasi memang telah menjadi prioritas dari masing-masing Korea maka hal tersebut akan menjadi mungkin dengan sedikit "mengabaikan prestis". Tindakan tersebut tercermin dari keputusan Korea Utara yang menyetujui usulan Selatan untuk mau berdiskusi dengan Amerika Serikat terkait program nuklir yang selama ini menjadi salah satu momok isu keamanan dunia. Untuk pertama kalinya dalam pertemuan dengan Amerika Serikat, Korea Utara berjanji akan menghancurkan situs nuklir. Janji Kim Jong Un tersebut cukup mencengangkan, mengingat selama ini nuklir merupakan satu poin paling tidak bisa ditawar yang sejak awal juga telah menjadi *bargaining power* bagi Korea Utara.

Tindakan tersebut bukanlah suatu yang gegabah dan tidak masuk akal. Sebaliknya Kim Jong Un memperlihatkan dirinya sebagai sosok yang berani mengambil resiko. Lee menyatakan bahwa satu aspek penting untuk mencapai tujuan ini adalah untuk tindakan yang dilakukn oleh Korea Utara merupakan satu tindakan yang serius dan tidak sekedar gertakan oleh tetangga Korea Selatan dan Amerika Serikat. Yang perlu dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan tersebut adalah dengan membujuk dan “merayu” dua Negara tersebut untuk kembali ke negosiasi diplomatik dengan konsesi di belakangnya (Lee 2014). Berdasarkan pada pernyataan Lee dapat dilihat bahwa salam kasus reunifikasi ini, sebagai langkah keseriusan Kim Jong Un terhadap isu reunifikasi, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemimpin Korea Utara menginjakkan kaki di Korea Selatan, juga menginisiasi pertemuan dengan pemimpin Amerika Serikat, Donald Trump. Sebelum pertemuan kedua Negara, Kim Jong Un telah berjanji akan menghentikan uji coba senjata nuklir dan setuju untuk membongkar basis lokasi uji coba di Punggye-ri (Campbell 2018) yang mana tindakan-tindakan tersebut dapat diharapkan menjadi langkah awal upaya damai dari gencatan senjata tahun 1953 lalu. Kebijakan Kim Jong Un mengingatkan pada apa yang telah dilakukan oleh Kim Il Sung. Uni Soviet dan Tiongkok pada tahun 1970 hingga 1990-an, kala itu Kim Il Sung melakukan kebijakan membatasi jarak dengan Uni Soviet maupun Tiongkok, dengan tujuan untuk menyeimbangan hubungan antar dua negara dan untuk bisa mendapatkan bantuan dana guna mengatasi krisis. Hal ini pada dasarnya hanya merupakan strategi diplomasi yang memafaatkan hubungan rivalitas antara kedua negara tersebut. Tindakan Kim Il Sung dapat dikatakan hanya sebuah “kepura-puraan” sementara memanipulasi masing-masing negara target untuk dapat mencapai kepentingannya. (Lankov 2013).

Sedangkan dari pertemuan bersejarah kedua dalam kepemimpinan Kim Jong Un yang dilakukan di Singapura, telah disepakati bahwa Amerika Serikat berkomitmen akan memberikan jaminan keamanan kepada Korea Utara dan Kim Jong Un berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi secara menyeluruh, sebagaimana janjinya pada Amerika Serikat sebelum pertemuan tersebut dilakukan (Hardoko 2018). Fenomena tersebut sangat mengejutkan, mengingat pada awal kepemimpinannya, Kim Jong Un telah berhasil menggemparkan dunia internasional dengan melakukan uji coba senjata nuklir dan beberapa tes misil. Dalam hubungannya dengan negara-negara barat, adanya kebuntuan upaya diplomasi kian memperburuk kondisi dengan dunia internasional. Dari tindakan-tindakan tersebut Korea Utara pun mendapatkan julukan gelar sebagai negara autorasi yang paling unik dan penuh dengan teka-teki (Goffard 2014).

Dengan telah disepakatinya perjanjian dan kesepakatan damai antara Korea Utara, Korea Selatan dan Juga Amerika Serikat maka dapat dikatakan bahwa upaya reunifikasi Korea telah memasuki babak baru dalam sejarah upaya reunifikasi Korea. Pada dasarnya, isu reunifikasi korea ini memiliki dua hal yang masih belum terpecahkan, yakni isu reunifikasi korea itu sendiri dan juga isu-isu strategis setelah terwujudnya reunifikasi (Stankiewicz 2012). Untuk isu yang pertama, terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan diantaranya adalah kondisi politik. Kim Jong Un telah mengambil langkah perjanjian damai dan kerjasama dengan Amerika Serikat selaku pihak ketiga dalam isu reunifikasi. Sedangkan sengan Korea Selatan, kesepakatan damai juga telah dicapai. Dari pertemuan yang dilakukan di Panmunjeom, dua Korea telah menyetujui banyak hal dan akan menindak lanjuti pertemuan tersebut dengan mengadakan berbagai pertemuan rutin, percakapan via telpon, melakukan diskusi rutin tentang berbagai isu penting kontemporer yang vital bagi bangsa Korea, memperkuat rasa kepercayaan antar Korea dan memperkuat momentum baik menuju hubungan yang berkelanjutan dan perdamaian, kemakmuran dan reunifikasi Semenanjung Korea. Sekali lagi perlu diingat bahwa dalam isu ini yang menjadi salah satu aktirnya adalah Korea Utara. Negara yang sering bertindak sesuai dengan rasional dan keyakinannya sendiri. Jadi bisa saja apa yang dilakukan Kim Jong Un saat ini akan seketika berubah pada masa mendatang. Hal seperti ini pernah terjadi dalam beberapa perjanjian denuklirisasi Korea Utara.

Korea Utara bukanlah negara yang murni komunis layaknya Uni Soviet, bukan juga komunis terapan ala Tiongkok. Paham di Korea Utara adalah perpaduan dari semuanya. Kim Il Sung telah menyusun paham yang telah dikenal dengan sebutah *Juche* sebagai konsep baru yang khusus diterapkan di Korea Utara. Ini menjadi dilemma, dimana jika reunifikasi berhasil maka dapat dipastikan Korea Utara akan mengalami revolusi secara nyata dalam berbagai bidang dan prediksi akan runtuhnya rejim menjadi benar adanya. Hal ini akan berdampak secara luas, Korea Utara akan menjadi sebuah negara yang terbuka dan dapat mengembangkan diri dengan leluasa, terhindar dari musibah kelaparan. Namun disisi lain para penguasa yang dikatakan sebagai diktator tersebut perlahan akan kehilangan keusaannya, dunia internasional akan dengan mudah ikut campur dalam isu humaniter yang dinilai telah banyak terjadi akibat sikap diktator tersebut. Selain itu, Korea Utara akan kehilangan posisi krusial dalam dunia internasional, jika janji Kim Jong Un, memang nyata. Jikapun pada akhirnya Korea Utara masih diijinkan untuk mengembangkan senjata nuklir, maka hal tersebut akan dikontrol Amerika Serikat secara sangat hati-hati.

Selanjutnya permasalahan kedua adalah dukungan masyarakat Korea. Di Korea Utara, masyarakat Korea memandang reunifikasi sebagai hal yang nyaris mustahil dan hanya menjadi mimpi indah jika memang terjadi. Bagi mereka, isu reunifikasi hanya merupakan konsep yang dibangun untuk melakukan propaganda dan sebagai strategy untuk memimpin. Dikatakan juga, pada dasarnya reunifikasi Korea akan mengancam kekuasaan para elite berkuasa (Park 2018). Kendati demikian, menanggapi perkembangan isu reunifikasi saat ini sebagian besar masyarakat Korea Utara menyambutnya antusias dan optimis dengan hal tersebut. Di Korea Selatan, sebagian besar masyarakat menganggap gagasan reunifikasi sebagai hal yang tidak masuk akal dan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dukungan masyarakat terkait isu reunifikasi terus mengalami penurunan. Berdasarkan pada survei yang dipublikasikan tahun lalu oleh Institut Korea untuk Penyatuan Nasional, yang didanai oleh Korea Selatan dimana saat ini tercatat hanya sebanyak 57,8 persen masyarakat menganggap reunifikasi itu diperlukan, jumlah ini lebih sedikit dari tahun 2014 yang saat itu mencatat adanya dukungan masyarakat sebesar 69,3 persen dari kalangan tua. Sedangkan dari kalangan pemuda berusia 20-an tahun, tercatat hanya 38,9 persen yang mendukung dan menganggap reunifikasi diperlukan. Kondisi ini tentu dipengaruhi oleh lamanya pemisahan Semenanjung Korea yang telah menumbuhkan banyak perbedaan antara Utara dan Selatan dan kesenjangan antar dua Korea juga terlihat sangat jelas (Power 2018). Untuk itu, jika reunifikasi memang benar-benar akan diwujudkan, maka dua Korea kembali membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mengatasi kesenjangan tersebut. Terlebih hanya generasi tua yang masih antusias dengan isu ini, sedangkan generasi muda mereka lebih acuh dan melihat reunifikasi ini tidak memberikan banyak keuntungan.

### **III. KESIMPULAN**

Reunifikasi Semenanjung Korea telah menjadi isu panjang dan nyaris tidak pernah dicapai. Mengingat kegagalan berbagai upaya reunifikasi. Pada dasarnya reunifikasi Korea tidak dapat dilakukan melalui jalur militer atau kekerasan. Hal ini telah terbukti tidak efektif dan hanya memberikan kerugian berganda bagi dua Korea. Seiring dengan perkembangan politik internasional, hubungan dua Korea juga ikut mengalami kemajuan meskipun tidak signifikan. Korea Selatan menginisiasi upaya reunifikasi melalui jalur damai dan hal tersebut disetujui oleh pihak Utara. Kesepakatan tersebut juga termasuk tentang konsep reunifikasi yang baru, yakni penyatuan Korea sebagai dua negara yang saling mendukung dan hidup bersama dalam damai, bukan penyatuan dalam satu payung sistem negara berdaulat.

Meskipun demikian, upaya-upaya reunifikasi tetap mengalami kegagalan dan pada akhirnya isu reunifikasi menjadi isu yang tidak begitu menarik untuk diperbincangkan. Kendati demikian, pada awal 2018, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Korea Utara menawarkan reunifikasi dan menginginkan hal tersebut untuk segera direalisasikan. Keinginan tersebut dibalas Korea Selatan dengan tangan terbuka dan segera dua Korea mengadakan pertemuan untuk membahas isu reunifikasi tersebut. Kim Jong Un sebagai penerus dinasti Kim memulai babak baru yang akan menorehkan sejarah. Dalam melihat isu reunifikasi Kim Jong Un sangat memahami bahwa hubungan politik dengan Amerika Serikat akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi rencana reunifikasi tersebut. Hal ini kemudian mendorong Kim Jong Un melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan pemimpin Amerika Serikat, Donald Trump, dan berhasil mencapai kesepakatan-kesepakatan damai dan kerjasama.

Pada dasarnya apa yang dilakukan Kim Jong Un dalam mengupayakan reunifikasi Korea dapat dikatakan sebagai caranya mempertegas kemampuan kepemimpinannya. Hal ini didasarkan pada adanya banyak anggapan yang meragukan kemampuan Kim Jong Un memimpin negara tersebut. Beberapa tindakan telah dilakukan, seperti melakukan uji coba senjata nuklir, menyingkirkan saudara tiri dan paman yang dianggap dapat mengancam kedudukannya dan mengikat sang adik untuk menduduki posisi krusial dalam partai buruh. Berangkat dari tindakan-tindakan tersebut, dapat dikatakan bahwa tawaran reunifikasi Korea merupakan hal puncak dan krusial dari misinya untuk membuktikan pada dunia internasional tentang kemampuannya dalam memimpin Korea Utara.

Kim Jong Un sangat memahami bahwa upaya reunifikasi pada masa terdahulu selalu mengalami kegagalan karena campur tangan Amerika Serikat yang menghendaki adanya denuklirisasi Korea dan pengawasan pengembangan senjata nuklir jika Korea Utara masih menginginkan senjata nuklir tersebut. Tawaran tersebut sudah pasti akan ditolak oleh Korea Utara, sekalipun dia pernah menandatangani perjanjian tentang denuklirisasi. Namun, pada akhirnya perjanjian itu rusak dengan ditemukannya bukti bahwa Korea Utara masih terus melakukan pengembangan dan uji coba senjata nuklir. Dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa nuklir merupakan nilai tawar tertinggi bagi Korea Utara dalam politik internasional. Begitu pula, dalam tawaran reunifikasi oleh Kim Jong Un, nuklir menjadi umpan yang bagi Amerika Serikat untuk mau melakukan perundingan damai.

Sebagaimana sejarah yang pernah terjadi, upaya damai antara Amerika Serikat dengan Korea Utara tidak dapat dijadikan patokan pasti reunifikasi Korea akan segera terwujud. Selain itu reunifikasi dengan Selatan tidaklah mudah, sekalipun Amerika Serikat

telah berdamai dengan Korea Utara. Hal ini dikarenakan kurangnya antusiasme masyarakat Korea Selatan terhadap isu reunifikasi. Kemudian juga permasalahan akan kesenjangan dari kondisi yang sangat berbeda tentunya akan menjadi pekerjaan rumah pasca reunifikasi terealisasi.

Secara garis besar kesimpulan dalam tulisan ini adalah:

1. Kim Jong Un memahami bahwa isu reunifikasi merupakan hal yang akan menarik perhatian dunia. Entah itu memang menjadi hal yang serius ditawarkan atau hanya umpan untuk mendapatkan tujuan tertentu. Sehingga tawaran tersebut terlihat ambigu, meskipun telah mencapai beberapa pertemuan bersejarah. Hal ini dikarenakan karakter Korea Utara yang sering “tidak terduga”.
2. Dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Kim Jong Un memang diragukan oleh banyak pihak, isu reunifikasi dapat meningkatkan perhatian dan jika memang berhasil dapat dikatakan pula keberhasilan ini adalah titik awal revolusi Korea Utara yang dapat membuktikan bahwa Kim Jong Un adalah pemimpin yang layak. Namun disisi lain reunifikasi tersebut dapat mengancam eksistensi paham *juche* di Korea Utara.
3. Terdapat permasalahan seperti isu politis dan non politis yang harus diselesaikan baik sebelum maupun sesudah reunifikasi tersebut dilakukan, seperti perbedaan budaya.

Pada dasarnya posisi paper ini adalah ditengah, tidak terlalu optimis dengan terwujudnya reunifikasi, namun juga tidak pesimis. Penulis berharap dari tulisan ini akan muncul berbagai tulisan lain yang lebih masididik, mengingat isu reunifikasi masih dapat dikembangkan menjadi lebih luas, mengingat isu reunifikasi adalah topik yang kompleks dan dapat dikembangkan menjadi berbagai sub-bahasan dan ragam prespektif lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Yoon, Yang Seung dan Mohtar Mas'oeed, *Politik Luar Negeri Korea Selatan : Penyesuaian Diri Terhadap Masyarakat Internasional*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004. Hal.44

Pollack, Jonathan D.; Lee, Chung Min, "Preparing for Korean Unification : Scenarios and Implications". RAND, 1990.pdf.

Graham T. Allison, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*, dalam *Teori-teori Hubungan Internasional*, James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr. (Terj.) Harwanto Dahlan, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, UMY, 1996

Pitman, Avril, *From Ostpolitik to Reunification West German-Soviet Political Relation : Since 1974*, Cambridge University Press, 2002. pdf.

**Jurnal:**

Jung, Jai Kwan, Chad Rector, "South Korea's Reunification Dilemmas", *Asian Politics & Policy*-Volume 4, Number 4. Hal. 487–505, Policy Studies Organization. Published by Wiley Periodicals, Inc, 2012.

Goffard, Sietse, "North Korea Under Kim Jong Un: Security and Intelligence Issue Amid Heightened Hostilities", Harvard Model Congress, 2014. pdf.

Wojciech, Stankiewicz, *Current Prospects Of Korean Reunification Against The Background Of The Interstate Relations*, *Interdisciplinary Political And Cultural Journal*, Vol. 14, No. 1, 2012.

S. H, Choe, "Kim Jong-un Named Leader of North Korean Army", *The New York Times*, 31 Desember 2011, p A9 dalam Andika Fajar Pratama Putra, Faisyal Rani, "Kebijakan Luar Negeri Korea Utara Dibawah Kepemimpinan Kim Jong Un dalam Proliferasi Nuklir Terhadap Korea Selatan Tahun 2013-2015", *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016.

Meyers, S.L and S.H Choe, "North Koreans Agree to Freeze Nuclear Work; U.S. to Give Aid" *The New York Times*, 1 Maret 2012, p. A1 dalam Andika Fajar Pratama Putra, Faisyal Rani, "Kebijakan Luar Negeri Korea Utara Dibawah Kepemimpinan Kim Jong Un dalam Proliferasi Nuklir Terhadap Korea Selatan Tahun 2013-2015", *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016.

Lee, Sung-Yoon, "North Korea's Revolutionary Unification Policy", *International Journal of Korean Studies*, Vol. XVIII, No. 2, 2014. pdf

**Berita Online/Internet:**

Campbell, Charlie, "What Would Korean Reunification Look Like? Five **Glaring** Problems to Overcome," diakses melalui <http://time.com/5255381/north-south-korea-kim-jong-un-reunification/>.

Antony, Noval Dhuanuari, "Fakta Mengejutkan Kim Jong Un ke Korsel", diakses melalui detik.com

Fitriani, Amelia, "Pesan Tahun Baru Kim Jong Un Isyaratkan Reunifikasi Dua Korea,"

Beauchamp, Zack, "Juche, the state ideology that makes North Koreans revere Kim Jong Un, explained," diakses melalui <https://www.vox.com/world/2018/6/18/17441296/north-korea-propaganda-ideology-juche>.



\_\_\_\_, "Kim Jong-un to experiment with economic reforms in North Korea," diakses melalui <https://www.telegraph.co.uk/finance/economics/9414170/Kim-Jong-un-to-experiment-with-economic-reforms-in-North-Korea.html>

McKay, Hollie, "How many defectors escape North Korea and why don't we hear more from them?" Diakses melalui <http://www.foxnews.com/world/2017/10/19/how-many-defectors-escape-north-korea-and-why-dont-hear-more-from-them.html>

Hardoko, Ervan, "Begini Isi Kesepakatan Donald Trump dan Kim Jong Un", diakses melalui <https://internasional.kompas.com/read/2018/06/12/16342821/begini-isi-kesepakatan-donald-trump-dan-kim-jong-un>

Cain, Aine, "A look inside the daily life of Kim Jong Un, the North Korean dictator who's as secretive as he is dangerous", diakses melalui <https://www.businessinsider.com/kim-jong-un-daily-life-2017-6/?IR=T>

Park, Ui-sung, "Ask a North Korean: How do you imagine reunification?", diakses melalui <https://www.nknews.org/2018/03/ask-a-north-korean-how-do-you-imagine-reunification/>

Power, John and Michael Holtz, "Reunification? Many young South Koreans say, 'Let's not'", diakses melalui <https://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2018/0503/Reunification-Many-young-South-Koreans-say-Let-s-not>

#### **Lain lain:**

Unofficial translation of Panmunjeom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula